

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Seperti diketahui, koperasi merupakan guru perekonomian Indonesia. Pada masa kemerdekaan, koperasi merupakan tulang punggung atau penyangga utama dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi memiliki peran dan bagian yang difungsikan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian Indonesia. Ketiga pilar tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi (Megawati, 2019). Dari ketiga pilar itulah, meskipun koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia, namun secara realita merupakan pilar ekonomi yang jalannya paling tertinggal dibandingkan dengan BUMN dan BUMS itu sendiri. Berdasarkan pendapat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UMKM Setyo Heriyanto mengatakan eksistensi

lembaga koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi masyarakat di Indonesia.

Hal ini dikarenakan terdapat banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kurangnya SDM di dalam koperasi itu sendiri, kurangnya pengembangan individu dalam pengurus koperasi sehingga koperasi dirasakan sulit untuk berkembang. Kesulitan koperasi berkembang juga berkaitan dengan kondisi modal keuangan yang tersedia oleh lembaga koperasi itu sendiri. Kendala tersebut bisa disebabkan kurang adanya dukungan modal yang kuat ataupun ketersediaan modal mandiri untuk menjalankan sistem organisasi. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya sistem organisasi yang ditentukan oleh koperasi itu sendiri. Dengan kondisi seperti ini, maka koperasi tidak berjalan secara profesional dalam artian tidak sesuai dengan maksud dari tujuan organisasi koperasi pada umumnya. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis dan gerakan koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menghimpun dan mengelola berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan

Koperasi memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal tersebut dikarenakan koperasi mudah dijangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (bank). Banyak pihak meyakini bahwa koperasi sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan

keuangan melalui koperasi memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset, dan membangun produktivitas usaha. Koperasi menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus : menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan, (Anonim, 2009).

Hal yang cukup menarik adalah banyak masyarakat yang telah tertarik dengan koperasi bentuk (skim) pola syariah. Salah satu alasannya adalah dikarenakan skim pola syariah dalam mekanisme operasionalnya tidak menggunakan unsur bunga seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Akuntansi syariah merupakan alternatif bagi perusahaan atau pelaksana bisnis yang lebih menyukai metode-metode dengan dasar nilai agama islam dibandingkan akuntansi secara konvensional yang mengadaptasi dari sistem peradaban barat. Sejak lahirnya, akuntansi syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyak bermunculan berbagai entitas bisnis syariah ditengah perekonomian saat ini, baik itu yang berskala makro/besar maupun yang berskala mikro/kecil, baik itu dalam bentuk lembaga bidang keuangan maupun non keuangan, dengan mengemban amanah dalam membantu menyejahterkan rakyat dengan cara menghimpun serta meyalurkan dana kepada masyarakat dengan berlandaskan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan islam dan jauh dari praktik bunga/riba.

Dalam lingkungan perekonomian negara kita, posisi lembaga keuangan baik itu yang bersifat konvensional maupun non konvensional (syariah),

keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Seperti halnya yang kita ketahui, bahwa salah satu fungsi lembaga keuangan adalah sebagai penyalur/intermediasi antara penyedia dana dan pengguna dana. Dengan demikian roda perekonomian masyarakat akan terus berjalan secara baik dan lancar.

Lembaga keuangan syariah diperlukan dalam perkembangan ekonomi sebagai pengelola keuangan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah haruslah memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal peningkatan mutu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam.

Munculnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah yang sulit untuk mendapatkan dana dan modal untuk kelangsungan usahanya sehingga dapat terus berjalan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjauhkan masyarakat dari unsur riba karena menggunakan prinsip syariah islam.

Selain prinsip syariah, koperasi syariah juga dituntut harus memahami tentang standar umum akuntansi syariah dalam menyusun laporan keuangannya. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia ada tiga jenis , yaitu : 1) SAK (Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum); 2)

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik); 3) SAK Syariah. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu entitas usaha pada satu periode akuntansi (Mulyadi, 2013). Melihat pentingnya laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan diharapkan memiliki kualitas tinggi yang tercermin dari dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2009).

Koperasi syariah seharusnya melaksanakan setiap aktivitas keuangannya mengacu pada standar akuntansi keuangan yang diakui. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak koperasi syariah yang belum menerapkan standar umum akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Secara garis besar penyusunan laporan keuangan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah mempunyai banyak perbedaan.

Bagi lembaga keuangan syariah tidak terkecuali koperasi syariah, tujuan dari laporan keuangan adalah : 1) Sebagai dasar pengambilan investasi dan pembiayaan; 2) Sebagai sarana untuk menilai dan mengevaluasi kelangsungan arus kas; 3) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi; 4) Memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah; 5) Memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syariah terhadap amanah dalam menggunakan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang

layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi; 6) Memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial (Fajarwati & Sambodo dalam Setyaningsih, 2014).

Tujuan laporan keuangan lembaga syariah tersebut sejalan dengan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009) yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan juga merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kepada pihak internal atau pun eksternal. Pihak internal yang dimaksud meliputi manajemen, pemegang saham, investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal meliputi kreditor dan pemerintah.

Pada umumnya, untuk lembaga koperasi termasuk lembaga koperasi syariah menggunakan acuan SAK ETAP sebagai standar umum akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut didasari oleh banyaknya jenis usaha dengan skala kecil dan menengah yang menjadi mayoritas bisnis masyarakat Indonesia. Selain itu juga banyak pihak beranggapan bahwa apabila dalam penyusunan laporan keuangan usaha skala kecil menggunakan PSAK secara umum dinilai akan lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penetapan SAK ETAP sebagai acuan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporannya

sendiri sehingga kedepannya akan mempermudah dalam usaha memperoleh dana/modal usaha.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh IAI pada tanggal 17 Juli 2009. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pihak eksternal. Pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (Chariri, 2017). Jenis usaha yang tergolong dalam entitas tanpa akuntabilitas publik banyak terdapat di Indonesia mulai dari usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha koperasi. Selain menggunakan SAK ETAP sebagai acuan, lembaga koperasi juga menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Data Koperasi dari Kementerian Koperasi (Kemenkop dan UKM) per 31 Desember 2019, jumlah unit koperasi aktif di Indonesia mencapai 123.048 unit, dari jumlah tersebut sebanyak 4.046 unit atau 3,29% merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Perkembangan KSPPS tentunya sangat potensial dengan kinerja yang baik, berkualitas, dari sisi kesehatan koperasi, SDM, IT.

Banyaknya penelitian yang dilakukan terhadap penerapan standar akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangan membuktikan bahwa pentingnya diberlakukan standar akuntansi koperasi dalam upaya menjaga

dan menciptakan koperasi yang berstandar, sehat, bersih, jujur, dan transparan dari aspek pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam koperasi itu sendiri. Hasil dari beberapa penelitian yang ditemukan penulis menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan koperasi yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Melihat kondisi tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan penerapan standar umum akuntansi koperasi khususnya KSPPS dalam penyusunan laporan keuangan. Penulis beranggapan bahwa koperasi syariah belum sepenuhnya memahami standar umum akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya, sejauh ini hanya sebatas tentang hukum dan pola syariah yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya.

Salah satu Koperasi Syariah yang fokus dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah atau kurang mampu melalui kredit pinjaman modal adalah KSPPS GEMI (Gerakan Ekonomi Kaum Ibu). Pada awalnya GEMI merupakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) YP2SU dalam upaya pemberdayaan kaum miskin di Kota Yogyakarta tahun 2002. Dalam perkembangannya berubah menjadi pemberdayaan yang memusatkan pada kaum ibu dengan kredit mikro (*microcredit*) berbasis kelompok dan menjadi sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Sasaran program KSPSS GEMI dalah kaum ibu-ibu kalangan kurang mampu dan dhuafa yang memiliki usaha dan yang akan membuka usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut ke dalam Skripsi dengan judul **“Penerapan Standar Umum Akuntansi Koperasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSPSS GEMI) Yogyakarta”**.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah bagaimana penerapan standar umum akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangan di KSPSS GEMI Yogyakarta?

## **C. Batasan Masalah Penelitian**

Penulis hanya memfokuskan kajian penelitian pada penerapan standar umum akuntansi koperasi (PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah) yang isinya meliputi : 1) Laporan Posisi Keuangan; 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; 5) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; 7) Catatan atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangan KSPSS GEMI Yogyakarta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksankannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar umum akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangan di KSPPS GEMI Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Pihak KSPPS GEMI Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi KSPPS GEMI Yogyakarta, serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan evaluasi internal dalam penyusunan laporan keuangan di KSPPS GEMI Yogyakarta.

2. Bagi Pembaca dan Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Dapat digunakan sebagai tambahan literasi dan sumber informasi bagi pengguna yang membutuhkan informasi terkait topik yang dimaksud serta daftar pustaka di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengetahui penerapan standar umum akuntansi koperasi dalam penyusunan laporan keuangan di KSPSS GEMI Yogyakarta dan menambah pengetahuan terkait standar umum akuntansi koperasi yang diberlakukan.

## **F. Kerangka Penulisan Skripsi**

Penulisan Skripsi ini akan disusun dan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang penulis gunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian terkait topik yang penulis kaji, yaitu Penerapan Standar Umum Akuntansi Koperasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSPPS GEMI) Yogyakarta.

### **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan lebih rinci tentang metodologi yang digunakan, sumber data, objek penelitian dan hal lainnya dalam melakukan penelitian. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tentang informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang proses pengolahan data dan penyajian data yang akan dibahas ke dalam sub

judul dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh penulis.

## 5. BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini merupakan hasil/kesimpulan dari penelitian terkait topik yang dikaji oleh penulis. Pada bab ini juga terdapat implikasi dan saran untuk objek pengamatan yang nantinya dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam evaluasi bagi objek penelitian yaitu KSPPS GEMI Yogyakarta.